DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

KALEIDOSKOP LPEFD 2022

LPEFD
Edisi XXXIV
Desember 2022

EXECUTIVE SUMMARY

Kinerja Transfer ke Daerah (TKD) November 2022 secara umum menunjukkan peningkatan kinerja yang lebih baik secara nominal maupun tingkat penyaluran dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga November, TKD telah mencapai 90,9% terhadap alokasi TKD Tahun Anggaran 2022. TKD juga hadir untuk memberikan dampak di berbagai indikator pembangunan sosial dan perekonomian di daerah antara lain berupa dukungan TKD untuk belanja bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (termasuk masyarakat pedesaan), ketahanan pangan, dan pariwisata.

Kinerja Fiskal Daerah pada edisi ini selain menjelaskan kinerja APBD bulan November 2022, juga menjelaskan beberapa catatan penting dalam pengelolaan fiskal daerah selama 2022. Pada sisi pendapatan hingga bulan kelima mengalami kontraksi pada sektor kinerja PAD dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja PAD mulai tumbuh positif *YoY* pada akhir semester pertama karena peningkatan realisasi pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seiring dengan pulihnya pergerakan dan konsumsi di daerah. Sedangkan kinerja belanja daerah sangat dipengaruhi oleh turunnya realisasi belanja gaji dan tunjangan, serta belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Selain itu terjadi penurunan belanja tidak terduga sebagai akibat *high base effect* pada belanja daerah terkait COVID-19 dan pemulihan ekonomi pada 2021.

Rubrik **Inovasi Daerah** pada edisi kali ini mengangkat kembali berbagai inovasi yang ditampilkan pada rangkaian LPEFD selama tahun 2022, mulai dari inovasi di bidang pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan hingga belanja, serta inovasi di bidang pembangunan dan perekonomian di daerah. Sedangkan pada sisi **Kabar Daerah**, diangkat beberapa publikasi atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah.

Edisi kali ini menyajikan rubrik **Kaleidoskop** yang merangkum berbagai potret kinerja yang telah dimuat dalam rangkaian LPEFD tahun 2022. Kinerja tersebut dibagi atas kinerja sosial, ekonomi, dan keuangan daerah. Tahun 2022 merupakan tahun titik balik pasca puncak pandemi yang penuh dengan tantangan. Kinerja sosial, ekonomi, dan keuangan selama 2022 secara umum mengindikasikan sinyal positif dan pemulihan.

Sebagai edisi pamungkas atas rangkaian LPEFD tahun 2022, edisi kali ini memuat **Kompendium** yang merangkum dinamika umum kondisi perekonomian nasional dan respon kebijakan fiskal selama 2022.

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY 02

DAFTAR ISI 03

KINERJA TRANSFER KE DAERAH 04

KINERJA FISKAL DAERAH 06

INOVASI DAERAH & KABAR DAERAH 09

KALEIDOSKOP 14

KOMPENDIUM LPEFD 20

KINERJA TRANSFER KE DAERAH (TKD) NOVEMBER 2022

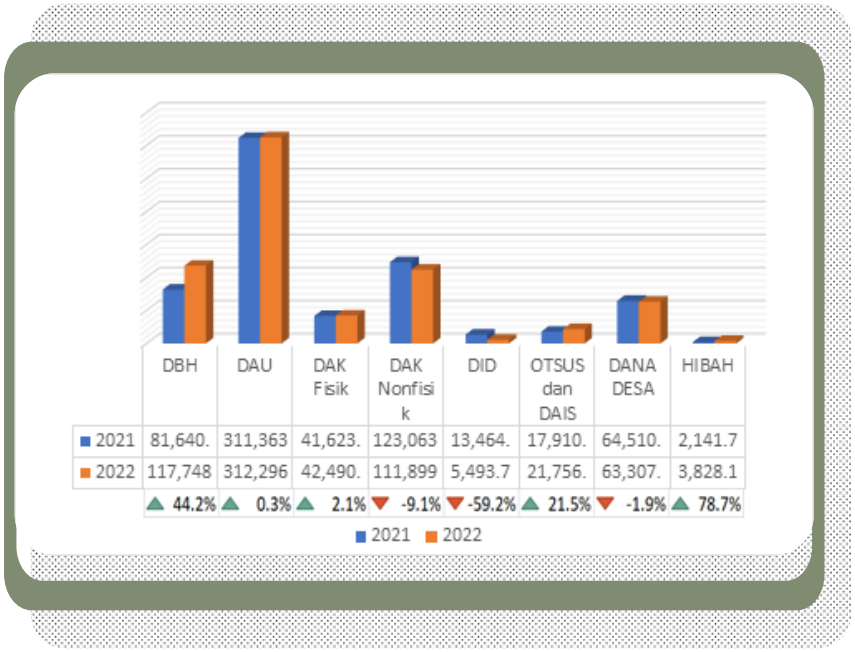

Grafik I. 1. Penyaluran TKD s.d November 2022

Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan bulan November 2022 menunjukkan kinerja yang sedikit lebih baik secara nominal maupun tingkat penyaluran dengan adanya penyaluran TKD sebesar Rp713,7 triliun (90,9% tersalur terhadap alokasi TKD Tahun Anggaran 2022) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang tersalur sebesar Rp711,0 triliun (89,3% dari alokasi TKD Tahun Anggaran 2021). Peningkatan kinerja ini disebabkan adanya peningkatan penyaluran dari DAU, Dana Otonomi Khusus/Dana Istimewa, DAK Fisik, dan DBH. Peningkatan penyaluran DAU didukung dengan peningkatan kepatuhan syarat salur DAU.

Peningkatan penyaluran TKD bulan November ini juga disebabkan adanya penyaluran dana otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahap II. Penyaluran DBH lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan penyaluran KB DBH 2021 sebagian telah disalurkan dan peningkatan penyaluran DBH Reguler Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Penyaluran DAK Fisik lebih tinggi disebabkan terpenuhinya syarat salur DAK Fisik bidang Jalan, Pendidikan, dan Kesehatan yang disampaikan lebih cepat.

Penyaluran Dana Desa sampai dengan 30 November 2022 sebesar Rp63,2 triliun (93,0% dari pagu Dana Desa). Realisasi penyaluran BLT Desa yang sudah disalurkan ke RKD sebesar Rp25,4 triliun (93,3%).

Hibah Daerah dilaksanakan berdasarkan *output based* dimana pemerintah daerah mengerjakan terlebih dahulu kegiatannya baru kemudian dimintakan *reimburse* dana hibah ke DJPK. Realisasi Hibah Daerah sampai dengan 30 November 2022 sebesar Rp3.828,1 miliar terdiri atas realisasi Hibah Luar Negeri dengan jenis Hibah Pencegahan Risiko Banjir (FMSRB) sebesar Rp103,4 miliar, Hibah Instalasi Pengolahan Air Limbah Palembang (IPAL) sebesar Rp142,4 miliar, Hibah IPDMIP sebesar Rp909,9 miliar, Hibah MRT sebesar Rp2.353,3 miliar, Hibah Air Limbah LN (HAL) sebesar Rp11,5 miliar, Hibah BioCF sebesar Rp4,65 miliar, Hibah Air Minum Australia (AMBK) sebesar Rp1 miliar, Hibah Pemberdayaan dan Pedesaan (READSI) sebesar Rp42,2 miliar, dan Hibah UPLAND sebesar Rp133,5 miliar. Sementara untuk Hibah Rupiah Murni terdiri dari realisasi Hibah Jalan Daerah sebesar Rp126,2 miliar.

Kebijakan TKD yang berdampak pada indikator pembangunan sosial dan perekonomian di daerah, antara lain berupa dukungan TKD untuk belanja bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (termasuk masyarakat pedesaan), ketahanan pangan, dan pariwisata. Dukungan TKD pada aspek layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk membangun dan mempertahankan SDM daerah yang berkualitas di daerah agar lebih berdaya saing, terampil, inovatif, produktif, dan berkelanjutan dalam menjalankan aktivitas sosial dan perekonomiannya.

Dana TKD yang digunakan untuk mendukung sektor pendidikan bersumber dari DAK Fisik, DAK Nonfisik, DAU, DBH, DID, dan Otonomi Khusus dengan total alokasi untuk pendidikan sebesar Rp290,9 triliun. Dukungan dana TKD untuk bidang pendidikan telah tersalur sebesar Rp268,6 triliun atau telah tersalur 92,3% sampai dengan akhir November 2022. Dana Transfer ke Daerah yang digunakan untuk mendukung sektor kesehatan bersumber dari DAK Fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, DBH, DID, dan Otonomi Khusus dengan alokasi sebesar Rp36 triliun. Dukungan TKD untuk sektor kesehatan telah tersalur sebesar Rp27,1 trilun atau 75,3% sampai dengan akhir November 2022.

KINERJA TRANSFER KE DAERAH (TKD) NOVEMBER 2022

Pada aspek penguatan daya beli, dukungan TKD perlindungan sosial dan ketahanan pangan ditujukan sebagai bantalan sosial masyarakat termasuk masyarakat petani, nelayan, rumah tangga di pedesaan di saat menghadapi tekanan inflasi dari harga komoditas energi dan pangan. Dukungan TKD untuk perlindungan sosial tahun 2022 sebesar Rp27,2 triliun dan telah tersalurkan sebesar Rp25,4 triliun atau 93,3%. Penyaluran TKD untuk perlindungan sosial pada 30 November 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang hanya tersalur sebesar Rp19,6 triliun atau 68,1%. Dukungan TKD untuk ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp8,3 triliun dan telah tersalur sebesar Rp6,1 triliun (73,8%) yang berasal dari DAK Fisik dan DAK Nonfisik.

Pada aspek infrastruktur, dukungan TKD belanja investasi infrastruktur dimaksudkan untuk menunjang dan memfasilitasi aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat daerah berupa penyediaan jalan, irigasi, perumahan/permukiman, sanitasi, dan air minum termasuk untuk kemudahan distribusi dan rantai pasok komoditas ekonomi. Dukungan TKD untuk infrastruktur tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp92,4 triliun dan telah tersalur sebesar Rp81,1 triliun (87,8%) yang berasal dari DTU, Dana Tambahan Infrastruktur, dan DAK Fisik.

Selain dukungan TKD pada berbagai aspek di atas, ada pula dukungan TKD untuk sektor pariwisata dan dan informasi, teknologi, dan komunikasi. Dukungan TKD untuk pariwisata sebesar Rp2,6 triliun dan telah tersalur sebesar Rp1,7 trliun (66,5%). Dukungan TKD yang digunakan untuk *Information, Communication and Technology* (ICT) sebesar Rp4,1 triliun dan telah tersalur sebesar Rp5,6 triliun (134,9%) yang bersumber dari DAK Fisik dan DAK Nonfisik.

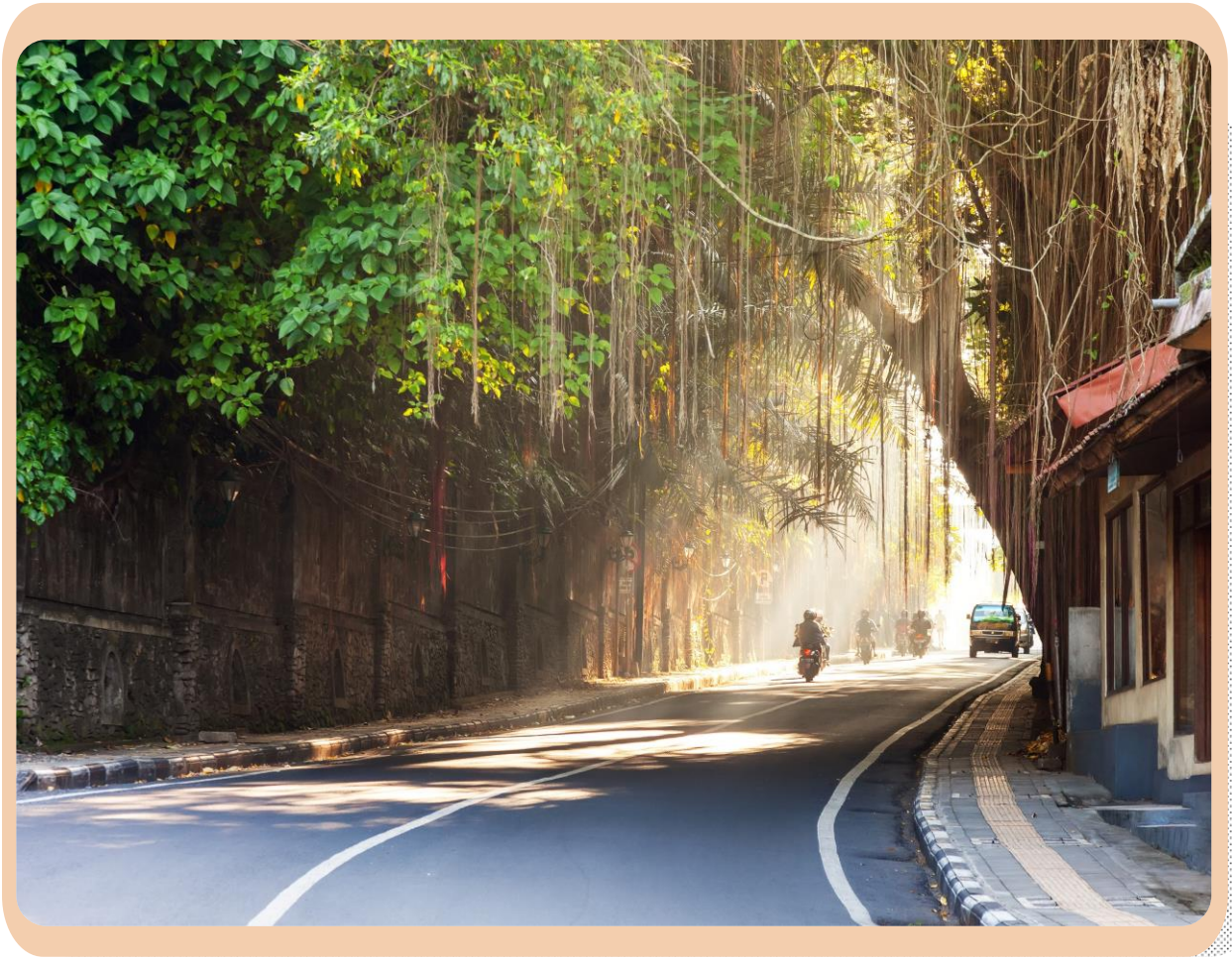

KINERJA FISKAL DAERAH

Hingga November 2022, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp964 Triliun atau terkontraksi 0,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja daerah pada periode yang sama justru tumbuh positif 2,04 persen dengan realisasi sebesar Rp858 triliun. Di tengah kontraksi pendapatan daerah, PAD tumbuh positif hingga mencapai 9,1 persen yoy. Sementara itu dari semua komponen belanja daerah, terlihat belanja pegawai dan belanja lainnya yang mengalami pertumbuhan negatif. Belanja pegawai masih melanjutkan tren kontraksinya hingga periode november 2022 ini dengan penurunan sebesar 0,3 persen *yoy*. Belanja lainnya juga melanjutkan tren pertumbuhan negatif. Hingga November 2022, realisasi belanja lainnya terkontraksi minus 4,9% *yoy*.

Grafik II. 1. Realisasi APBD s.d November 2022

Sepanjang TA 2022 terdapat beberapa catatan penting dalam pengelolaan fiskal daerah. Dari sisi pendapatan, hingga bulan kelima, kinerja PAD masih tercatat kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh komponen dari PAD baik itu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan maupun lain – lain PAD yang sah turut berkontribusi pada menurunnya PAD. Kinerja positif PAD mulai terlihat pada akhir semester pertama dengan pertumbuhan positif secara *year on year*. Meningkatnya realisasi pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi pendorong utama pertumbuhan PAD pada akhir semester pertama. Tren peningkatan PAD berlanjut hingga menjelang akhir triwulan empat. Namun ditengah tren peningkatan tersebut, retribusi daerah justru mengalami kontraksi meskipun cukup rendah yaitu sebesar minus 0,3 persen hingga november 2022.

Satu hal lagi yang menarik, meskipun semua komponen PAD secara umum, dan pajak daerah secara khusus mengalami penurunan hingga pertengahan triwulan kedua, namun sebagian besar pajak–pajak daerah utama yang berbasis konsumsi masyarakat tumbuh positif. Tumbuhnya pajak–pajak utama atas konsumsi masyarakat ditengah kontraksi PAD ini tetap memberikan sinyal semakin membaiknya aktivitas ekonomi utamanya yang terkait sektor perdagangan besar dan eceran, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor transportasi dan pergudangan.

Sementara itu dari sisi belanja, juga terdapat beberapa catatan peristiwa penting sepanjang TA 2022. Belanja daerah tahun 2022 ini mengalami periode kontraksi yang cukup panjang. Tercatat hingga agustus, belanja daerah masih mengalami pertumbuhan minus 1,7 persen. Namun demikian, perbaikan kinerja belanja daerah sebenarnya mulai terlihat pada akhir semester pertama dimana belanja barang dan belanja modal mulai tumbuh positif secara *year on year* setelah mengalami kontraksi terus menerus hingga Mei 2022.

KINERJA FISKAL DAERAH

Belanja gaji tunjangan dan belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi kontraksi belanja. Hingga triwulan kedua bahkan awal triwulan ketiga, belanja TPP belum terbayarkan sepenuhnya mengingat persetujuan pemberian TPP yang didasarkan pada peraturan kepala daerah mengalami keterlambatan. Realisasi pembayaran TPP mulai tumbuh positif pada pertengahan triwulan ketiga. Fenomena ini terjadi hampir pada semua wilayah. Terlebih lagi juga dalam hal realisasi gaji dan tunjangan yang mengalami kontraksi berkepanjangan bahkan menjelang akhir triwulan empat. Hingga November 2022, realisasi pembayaran gaji dan tunjangan masih terkontraksi minus 0,4%. Kebijakan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang lebih longgar dibandingkan tahun sebelumnya nyatanya tetap tidak dapat mendorong pertumbuhan belanja pegawai. Implikasi makro atas fenomena tersebut adalah terkontraksinya konsumsi pengeluaran pemerintah yang memang salah satu determinannya adalah belanja pegawai. Hal tersebut terjadi saat perekonomian mengalami pertumbuhan yang cukup impresif.

Satu hal yang lain, terkontraksinya belanja lainnya juga merupakan andil dari rendahnya realisasi belanja tidak terduga. Semakin terkendalinya pandemi COVID-19 tahun 2022 ini tentunya merubah prioritas belanja daerah khususnya terkait anggaran kontijensi sehingga menyebakan realisasi belanja tidak terduga tidak lagi diperlukan sebanyak tahun sebelumnya. Dengan demikian, kontraksi belanja tidak terduga sepanjang tahun 2022 ini lebih disebabkan karena *high base effect* meskipun secara kumulatif tetap dianggarkan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

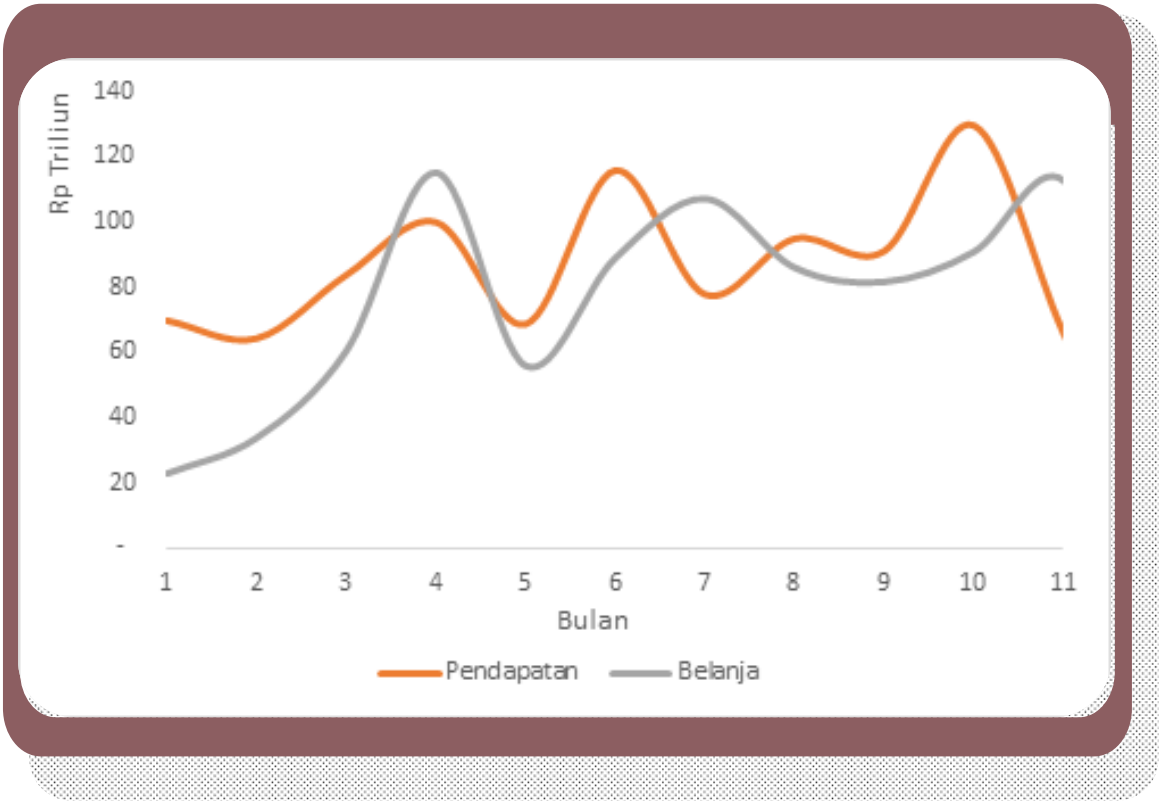

Grafik II. 2. Pola Realisasi APBD Bulanan TA 2022

Kinerja pengelolaan fiskal juga dapat dilihat pada aspek distribusi penerimaan maupun pengeluaran per bulannya karena semakin cepat suatu anggaran dibelanjakan semakin berpengaruh pula pada transaksi ekonomi. Dalam grafik diatas terlihat pola distribusi pendapatan daerah secara bulanan relatif lebih merata dibandingkan realisasi belanja daerah. Hingga triwulan pertama, selisih pendapatan daerah dan belanja daerah cukup tinggi sehingga menyebabkan terjadinya surplus anggaran yang tinggi. Secara keseluruhan, intensitas belanja daerah terjadi pada triwulan ketiga dan keempat sedangkan intensitas pendapatan terjadi di triwulan kedua. Realisasi pendapatan daerah yang cukup tinggi terjadi pada bulan April, Juni dan Oktober. Sementara kebutuhan belanja daerah yang tinggi terjadi pada bulan April, Juli dan November, dimana hanya pada ketiga bulan tersebut realisasi belanja lebih tinggi dibandingkan realisasi pendapatan. Perbedaan intensitas antara pendapatan dan belanja itulah yang menyebabkan kurang optimalnya penyerapan anggaran sehingga selanjutnya akan menciptakan sisa lebih anggaran atau SiLPA.

KINERJA FISKAL DAERAH

Jika dilihat lebih rinci pada belanja per jenis maka belanja pegawai memiliki distribusi belanja per bulan yang lebih merata dibandingkan dengan belanja lain meskipun terdapat fluktuasi yang diakibatkan pengaruh pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Sementara itu, belanja modal memiliki derajat kemiringan grafik yang paling tinggi menunjukkan distribusi belanjanya tidak merata per bulan namun banyak dilakukan di akhir–akhir tahun. Belanja barang dan belanja lainnya memiliki kemiripan pola dimana mengalami intensitas belanja tertinggi pada bulan April, Juni dan November.

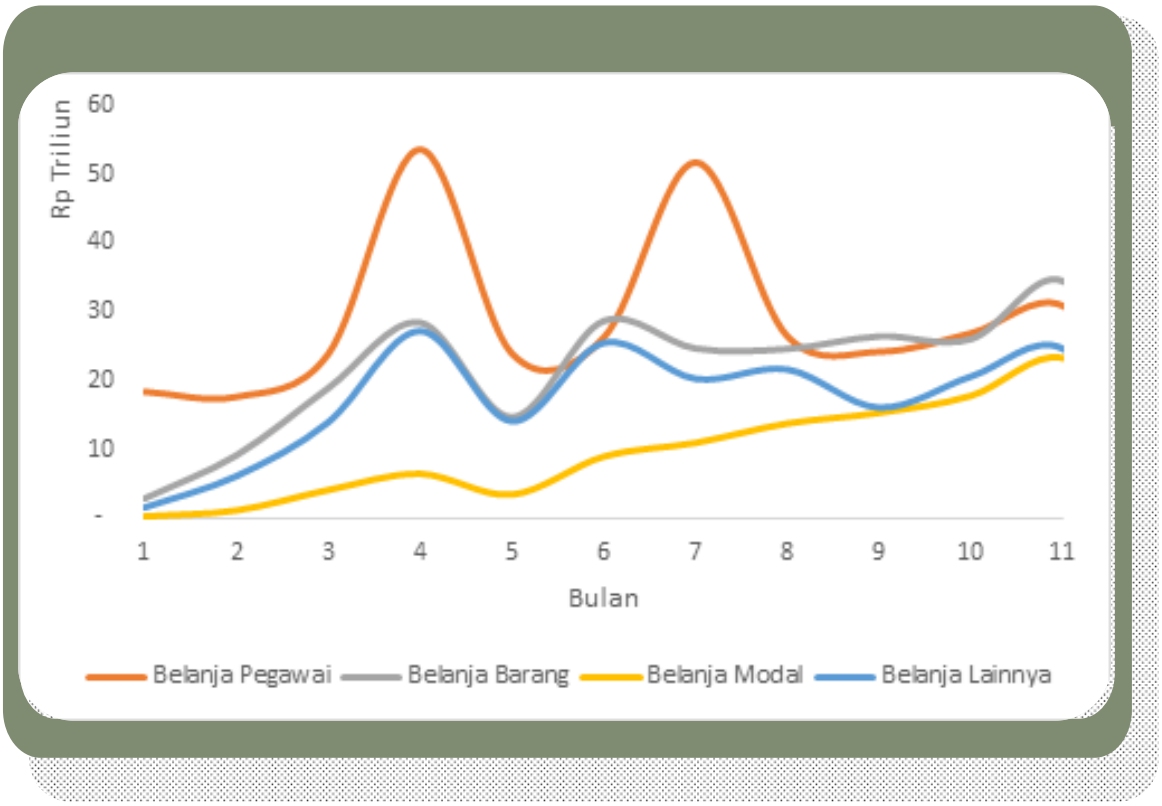

Grafik II. 3. Pola Realisasi Belanja Daerah Bulanan TA 2022

INOVASI DAERAH DAN KABAR DAERAH

Inovasi Daerah Meningkatkan Pelayanan Publik dan Pendapatan Daerah serta Menarik Investasi

Inovasi merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah saat ini, khususnya di era teknologi informasi dan globalisasi. Pemerintah Daerah melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah dan menarik investasi di daerah. Dengan inovasi yang diciptakan oleh daerah tidak jarang menghasilkan penghargaan-penghargaan yang dapat mendorong untuk bergerak lebih maju lagi dan bisa menjadi penyemangat bagi Pemerintah Daerah lain untuk meniru dan menciptakan inovasi baru.

Pada edisi kaleidoskop kali ini akan mengulas inovasi daerah yang telah dimuat dalam edisi LPEFD selama tahun 2022. Kita mulai dari inovasi dalam edisi bulan April dengan menampilkan inovasi daerah yang telah dilakukan oleh Kota Bandung dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari Pajak Daerah dengan menciptakan suatu aplikasi *Electronic Self-Assessment Tax Reporting Application* (E-SATRiA) yang merupakan pemanfaatan aplikasi berbasis *web* untuk pelaporan dan pembayaran pajak-pajak daerah *self-assessment* tertentu yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan. Aplikasi tersebut berhasil mendapatkan penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik pada tahun 2018. Edisi bulan Oktober juga menampilkan inovasi yang sama dalam meningkatkan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Kota Malang dengan meluncurkan sistem pajak online atau *e-tax*. Adanya pajak *online* ini mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena pada program ini terdapat *Case Management System* (CMS) yang akan menghitung sendiri pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pada edisi bulan November, Kota Pekalongan dengan inovasi kebijakan Pekalongan Peduli Sosial Ekonomi (P2SE) dan Pekalongan Tanggap dalam rangka pemulihan ekonomi dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat, akademisi, pengusaha, dan ASN.

INOVASI DAERAH DAN KABAR DAERAH

Inovasi Daerah Meningkatkan Pelayanan Publik dan Pendapatan Daerah serta Menarik Investasi

Selanjutnya terkait inovasi yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, edisi bulan Juni dengan Kota Magelang memanfaatkan portal DataGo untuk memantau gejolak harga secara berkala dan membantu Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mendapatkan early warning dari hasil pemantauan harga di beberapa pasar besar di Kota Magelang. Selanjutnya ada Kabupaten Teluk Bintuni pada edisi bulan Agustus dengan inovasi di bidang pendidikan dan bidang kesehatan yang dapat mendukung tercapainya target indikator IPM. Di bidang pendidikan, Kab. Teluk Bintuni menciptakan program Rumah Pintar Masyarakat Bintuni (Rumpi Masbin), di mana program tersebut diselenggarakan dalam rangka meningkatkan literasi dan mengurangi angka buta huruf di Distrik Babo dan Distrik Weriagar. Selain itu, Kab. Teluk Bintuni juga mengalokasikan anggaran bidang pendidikan. Dengan meningkatnya literasi akan pendidikan, diharapkan mampu meningkatkan minat untuk bersekolah sehingga dapat mendukung HLS dan RLS dalam dimensi pendidikan dalam IPM. Edisi Bulan September terdapat Kabupaten Jombang mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis *digital smart city* dan *smart village* yang mendukung penyelesaian beberapa proyek strategis di Kabupaten tersebut. Inovasi ini hadir dengan konsep ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim. Untuk mendukung kegiatan tersebut, sinergi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan manusia bidang ekonomi dituangkan dalam kerangka prioritas kegiatan daerah tahun 2023 dengan tujuan mengurangi disparitas wilayah dan mewujudkan percepatan pembangunan sampai ke tingkat kecamatan dan desa.

Daerah juga melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah seperti yang termuat pada edisi Mei dengan Inovasi daerah sinergi pendanaan Pusat-Daerah dalam Pembangunan RSUD Provinsi Sulawesi Utara. Pada proyek tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan sinergi pendanaan yang terdiri dari APBD, APBN, Hibah, dan Pinjaman PT SMI (Persero). Kabupaten Madiun pada edisi bulan Juli dengan keberhasilanya melakukan skema KPDBU untuk Alat Penerangan Jalan (APJ). Dukungan APJ merupakan salah satu prasarana penting dalam menjaga keselamatan publik dan mendorong perekonomian. Adanya APJ yang baik akan mendukung pergerakan manusia dan barang secara lebih cepat, aman, dan efisien. Hal ini tentunya menjadi prasyarat untuk mendorong perekonomian lebih baik dan dapat menarik investasi ke daerah.

KABAR DAERAH

#1 Provinsi Gorontalo Terbaik dalam Pengelolaan APBD

Pada Rakornas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 (2 Juni 2022), Menteri Dalam Negeri mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo dinilai terbaik dalam pengelolaan APBD. Keberhasilan ini membuat Provinsi Gorontalo meraih dua penghargaan sekaligus yakni sebagai terbaik pertama dalam Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi dan terbaik ketiga realisasi Peningkatan PAD Tertinggi. Terdapat 4 kategori penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu kategori Realisasi Pendapatan Daerah tertinggi, kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi, kategori Realisasi Peningkatan PAD tertinggi, dan kategori realisasi Program Taspen (Taspen *Award*). Setiap kategori terbaik diberikan kepada lima pemerintah provinsi, lima pemerintah kabupaten dan lima pemerintah kota.

……

https://gorontaloprov.go.id (diunduh 11 Desember 2022)

#2 Pemanfaatan Aplikasi Tangerang Satu Data untuk Pelayanan Masyrakat

Pada Rapat Evaluasi Pembangunan Kota Tangerang (Senin, 18 Juli 2022), Wali Kota Tangerang, menginstruksikan kepada seluruh OPD dan kecamatan untuk mempermudah akses serta integrasi data dari masing-masing instansi melalui “Aplikasi Tangerang Satu Data”. Aplikasi ini merupakan Big Data Kota Tangerang dalam kerangka penyediaan data yang benar dan aktual. Dengan pemanfaatan Big Data melalui Aplikasi Tangerang Satu Data, kemudahan akses serta integrasi data dari masing-masing instansi diharapkan dapat mempercepat sistem pelayanan dan informasi pemerintah kepada masyarakat Kota Tangerang. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang, Aplikasi Tangerang Satu Data merupakan pendetilan dari Aplikasi Satu Data Indonesia sesuai Perpres nomor 39 tahun 2019.

……

https://www.jurnaljabar.id (diunduh 11 Desember 2022)

#3 Kabupaten Bantaeng Raih Predikat Kabupaten Terbaik dalam Penghargaan Pembangunan Daerah 2022

Pada Kamis, 28 September 2022, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI menobatkan Kabupaten Bantaeng menjadi Kabupaten yang terbaik secara nasional pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2022. Kabupaten Bantaeng mendapatkan penghargaan PPD 2022 berkat adanya sejumlah program unggulan, salah satunya program unggulan asuransi pertanian dan peternakan. Bappenas menilai bahwa program unggulan asuransi pertanian dan peternakan telah berhasil melindungi petani dan peternak dari gagal panen dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi Kabupaten KBantaeng yang sempat terpuruk akibat Pandemi COVID-19. Diraihnya penghargaan ini tidak terlepas juga karena adanya peran dan sinergi masyarakat dan pemerintah yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan dengan inovasi-inovasi.

……

https://bantaengkab.go.id (diunduh 11 Desember 2022)

KABAR DAERAH

#4 (+) Kota Yogyakarta menjadi Kota Terbaik Pertama dalam Penghargaan Pembangunan Daerah 2022

Setelah mendapat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan juara terbaik pertama kategori PPID Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik dari Komisi Informasi Daerah DIY, Kota Yogyakarta kembali menambah raihan prestasi di bulan September yaitu menjadi Kota Terbaik Pertama pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2022. PPD merupakan apresiasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kepada pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan yang berkualitas, pencapaian target-target pembangunan daerah, dan juga inovasi pembangunan yang telah dilakukan. Penghargaan ini diberikan sehubungan dengan inovasi Kampung Sayur yaitu adanya lorong sayur di kampung-kampung. Tahun 2017 hanya ada 69 lorong sayur/kampung sayur, namun sekarang sudah bertambah menjadi 115 yang diberdayakan untuk menanam aneka sayuran. Inovasi ini bukan sekadar untuk ketahanan pangan saja, tapi juga menguatkan solidaritas dan gotong royong masyarakat untuk mendukung penguatan kualitas gizi masyarakat dalam pencegahan stunting. Hasil panen kampung sayur hanya 30% yang dijual ke pasaran, sisanya untuk dibagikan untuk warga sekitar. Inovasi program urban farming ini bernama Kampung Sayur dengan motto *"Mangan Opo Sing Ditandur Nandur Opo Sing Dipangan",* yang artinya adalah memakan apa yang ditanam dan menanam apa yang dimakan. Inovasi ini sekaligus menunjukkan bahwa meski Kota Yogyakarta punya keterbatasan pada lahan pertanian, tetapi sumber daya manusia yang dimiliki itu kreatif dan inovatif yang paling penting.

.....

https://warta.jogjakota.go.id (diunduh 11 Desember 2022)

#5 (+) Koordinasi Optimalisasi Kinerja APBD Kabupaten Kotawarigin Timur

Pada Rakorda Triwulan III (Senin, 10 Oktober 2022), Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengatakan bahwa Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 belum mencapai target. Target yang ditentukan 85% pada Triwulan ke III, ternyata capaiannya baru mencapai kisaran 60-64%. Berdasarkan data realisasi per 30 September 2022, dari total belanja APBD murni tahun 2022 sebesar Rp1.952.192.996.037 tercatat bahwa capaian realisasi keuangannya baru sebesar Rp1.179.965.291.199 atau sebesar 60,44%, sedangkan realisasi fisik sebesar 64,62%. Sekertaris Daerah meminta kepada semua perangkat daerah agar benar-benar memanfaatkan sisa waktu kurang lebih dua bulan ke depan dengan memaksimalkan semua sumber daya yang dimiliki agar target yang sudah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Masing-masing perangkat daerah agar disiplin dalam proses perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya. Pengelolaan keuangannya juga harus tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar capaian target pada triwulan IV dapat mencapai realisasi keuangan sebesar 98% dan realisasi fisik 100%.

.....

https://prokalteng.co (diunduh 11 Desember 2022)

KABAR DAERAH

#6 (+) Kendala Penyerapan Belanja pada Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kepala Badan Keuangan Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) mengatakan bahwa realisasi penyerapan APBD Tahun Anggaran 2022 sampai pertengahan November 2022 mencapai 71% dari target Rp5 triliun, sedangkan realisasi belanja pada APBD Tahun Anggaran 2022 sudah mencapai 66%. Realisasi belanja daerah masih mengalami kendala lantaran banyak paket proyek infrastruktur jalan dan SPAM Air bersih yang belum selesai. Pemerintah Daerah berharap sampai akhir November 2022 penyerapan belanja daerah bisa mencapai 85% dan target belanja bisa mencapai 95%.

…….

https://www.victorynews.id (diunduh 11 Desember 2022)

#7 (+) Kebijakan Pajak Daerah mendukung Prestasi Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengapresiasi pencapaian realisasi pendapatan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 yaitu tertinggi secara nasional per 4 November 2022 Pukul 18.00 WIB dengan capaian sudah 106,94 persen. Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar diperoleh dari Pajak Daerah yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai penyumbang terbesar, diikuti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Sukses pencapaian ini karena didukung oleh kebijakan dan program kemudahan membayar pajak kendaraan bermotor. Petugas turun langsung ke lapangan jemput bola hingga *door to door* memberi kemudahan sekaligus memberi edukasi kepada warga untuk membayar pajak kendaraan bermotor melalui Program Samsat Keliling dan Samsat Setempoh di berbagai daerah kabupaten/kota se-Bangka Belitung. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak melalui program pemutihan pajak yang diharapkan dapat memberikan keringanan kepada masyarakat.

…….

https://babelprov.go.id (diunduh 11 Desember 2022)

KALEIDOSKOP

Aspek Sosial Daerah

Terdapat berbagai tema kinerja daerah yang telah disajikan pada Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah (LPEFD) dari edisi XXVI sampai dengan edisi XXXI selama tahun 2022. Adapun berikut adalah rangkuman LPEFD Periode 2022 sekaligus menjadi penutup LPEFD untuk tahun 2022.

Kinerja Penanganan *Stunting*

LPEFD XXVII membahas terkait sinergi pendanaan untuk mendukung kinerja penanganan stunting. Sebelum tahun 2017, penanganan stunting lebih banyak dibiayai oleh APBD, pada tahun 2017 dan setelahnya APBN melalui kementerian dan lembaga mulai lebih banyak mendanai belanja stunting dengan porsi secara umum lebih dari 30% dan meningkat menjadi lebih dari 40% pada 2018. Sinergi pendanaan Pusat-Daerah dalam Pembangunan RSUD Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari APBD, APBN, Hibah, dan Pinjaman PT SMI (Persero) dengan anggaran pembangunan sebesar Rp304 miliar yang telah rampung di Juni 2021. Sinergi pendanaan pada tahun 2022 dapat terlihat salah satunya pada Kemendikbudristek menjalin sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kerja sama MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dengan pendanaan *matching fund* sebesar Rp905 miliar.

KALEIDOSKOP

Kinerja Pariwisata

Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu masuk utama pada Maret 2022 mencapai 40,79 ribu kunjungan, naik 206,5% dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman dari pintu masuk utama pada Maret 2021. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari pintu masuk utama pada Maret 2022 juga meningkat sebesar 121,02%. Dibukanya pintu mancanegara dan pelonggaran peraturan mobilitas masyarakat membuat sektor pariwisata kembali tumbuh.

Kenaikan Harga BBM

Pemerintah secara resmi pada 3 September 2022 telah mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi. Hal ini berimplikasi pada perekonomian nasional dengan peningkatan inflasi yang berdampak pada daya beli masyarakat. Penanganan dampak inflasi didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan adanya penganggaran belanja perlindungan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Implementasi sinergi perlindungan sosial tersebut diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 yaitu berupa penganggaran belanja wajib perlindungan sosial pemerintahan daerah untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2022 sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) diluar Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditentukan penggunaannya. Dengan adanya sinergi penanganan untuk perlindungan sosial antara pusat dan daerah, masyarakat terdampak akibat inflasi di bidang energi dapat terbantu dan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

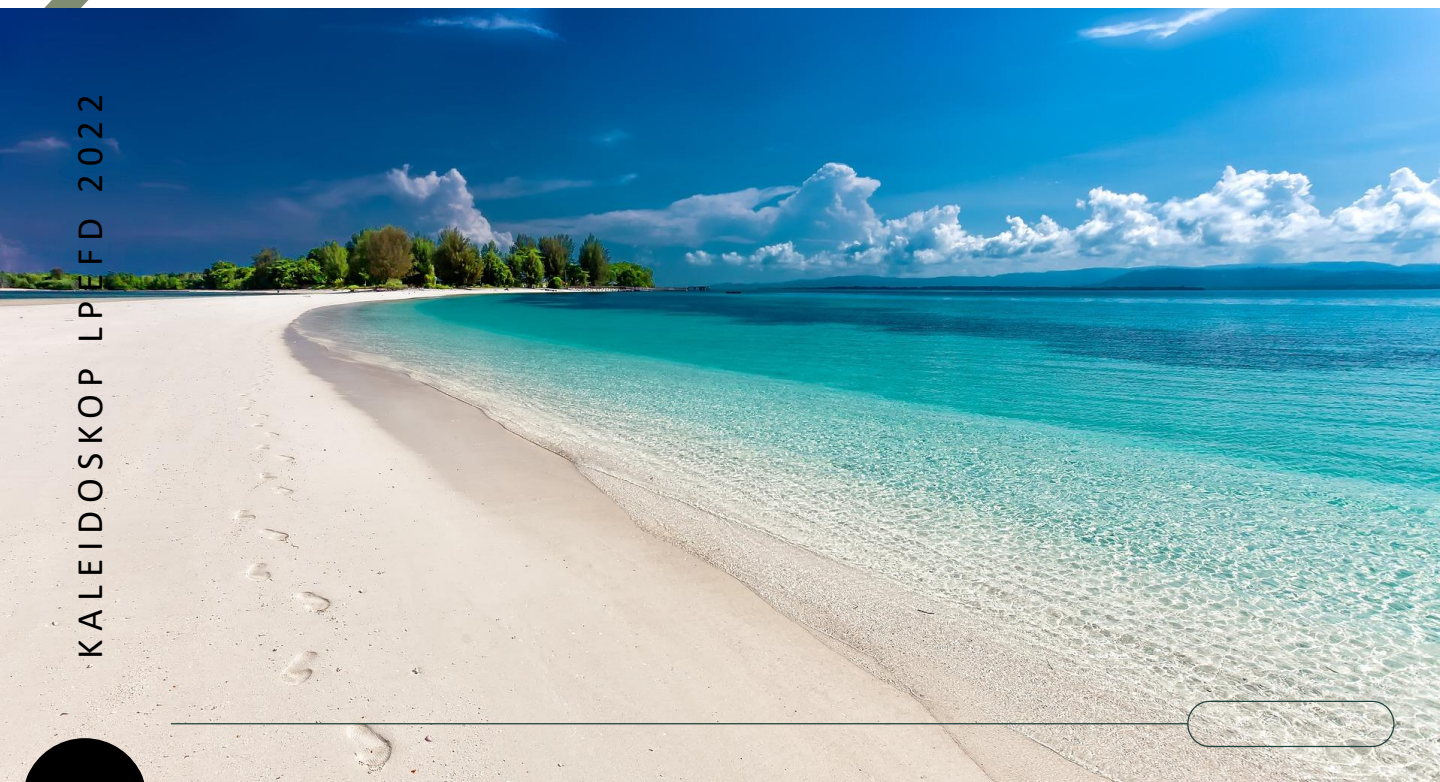

KALEIDOSKOP

Aspek Ekonomi Daerah

Secara umum kondisi perekonomian daerah pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari *mobility index* berdasarkan beberapa sektor yang secara nasional mengalami pertumbuhan positif dengan peningkatan terbesar pada tren mobilitas di tempat umum terbuka seperti taman. Selain itu, adanya event MotoGP dan Presidensi G20 juga secara spasial membawa peningkatan tren mobilitas transportasi umum di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali. Kedua event tersebut diduga menyebabkan peningkatan signifikan pada tren mobilitas sektor transportasi umum akibat peningkatan pengunjung. Hal ini mengindikasikan adanya dampak ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah setempat.

Kinerja Pembangunan Daerah

LPEFD edisi XXX menyajikan potret kinerja perekonomian nasional dan daerah dikaitkan dengan beberapa sasaran Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator sasaran pembangunan yang diatur dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Adapun untuk tahun 2022, indikator pertumbuhan ekonomi oleh Pemerintah dipatok pada kisaran angka 5,2% sampai dengan 5,5%. Atas sasaran tersebut, kondisi ekonomi Indonesia pada triwulan II-2022 dibanding dengan triwulan II -2021 masih on -track dengan mengalami pertumbuhan sebesar 5,44% (YoY). Kinerja pembangunan daerah dapat terlihat antara lain dari indikator ketenagakerjaan, tingkat pengangguran, dan indikator kemiskinan. Indikator ketenagakerjaan menunjukkan kinerja relatif membaik dan berada pada rentang target indikator RKP 2022. Tingkat pengangguran terbuka bulan Februari 2022 menunjukkan persentase sebesar 5,83% atau mengalami penurunan sebesar 0,43% poin dibandingkan dengan Februari 2021. Indikator kemiskinan bulan Maret 2022 masih menunjukkan kinerja yang belum memuaskan meskipun lebih dibanding dengan tahun 2021. Masih terdapat 26,16 juta orang penduduk miskin, namun angka ini turun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan turun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021.

KALEIDOSKOP

Kinerja Proyek Strategis Daerah

Pada LPEFD XXXI membahas terkait pelaksanaan agenda pembangunan nasional yaitu proyek strategis nasional yang diharapkan dapat mendukung berbagai sektor perekonomian nasional. Untuk mewujudkan proyek strategis didukung dengan berbagai sumber pendanaan salah satunya Transfer ke Daerah (TKD). Peran TKD sebagai sumber pendanaan dalam mendukung target pembangunan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional, seperti melalui DAK Non Fisik Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS) untuk program pembangunan instalasi listrik pengolah sampah menjadi energi listrik dan Hibah, DAK Fisik, DAK Non Fisik untuk daerah pariwisata. Sedangkan untuk air minum, dukungan tersebut berupa alokasi DAK Fisik dan hibah daerah.

Kinerja Pengendalian Inflasi

Pada bulan September, Inflasi mengalami lonjakkan yang cukup signifikan, hampir menembus level 6%, tepatnya di angka 5,95%. Peningkatan inflasi secara signifikan berpengaruh pada perencanaan pembangunan. Koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral terkait pengendalian inflasi antara pusat dan daerah memiliki peran yang penting. Hal tersebut telah diperkuat dengan diterbitkannya Keppres No.23/2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN). Ruang lingkup kerja dari Keppres tersebut meliputi mekanisme koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan secara regional berupa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota. Secara ringkas, pengendalian inflasi mencakup (i) keterjangkauan harga oleh masyarakat, (ii) ketersediaan pasokan komoditas, (iii) kelancaran distribusi, dan (iv) upaya membangun komunikasi yang efektif untuk mengelola persepsi masyarakat.

KALEIDOSKOP

Aspek Keuangan Daerah

Kinerja APBD

Realisasi APBD pada semester I 2022 menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan bulan sebelumnya. Meskipun realisasi pendapatan dan belanja secara secara kumulatif lebih rendah daripada periode yang sama pada tahun sebelumnya namun terdapat beberapa komponen pendapatan maupun belanja yang justru tumbuh pada semester I ini. Secara kumulatif, pajak daerah hingga semester I tahun ini tumbuh 9,2% (yoy) dengan kontribusi dari pertumbuhan 11 dari 16 jenis pajak daerah. Sementara itu, di sisi belanja daerah, hingga semester I ini masih terjadi kontraksi dengan pertumbuhan negatif 7,7%. Realisasi belanja hingga Juni sebesar Rp333,04 triliun, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp360,9 triliun.

Pada bulan Oktober 2022, realisasi pendapatan APBD mencapai 76,5% dan lebih tinggi (0,7%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selaras dengan realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja APBD pada bulan Oktober 2022 mencapai 61,2% atau tumbuh (3,5%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari segi kinerja penyaluran TKD TA 2022, baik secara nominal maupun tingkat penyaluran, sedikit lebih baik dibandingkan TA 2021 hal ini terjadi karena kepatuhan pemda yang lebih baik.

Kinerja Local Tax Power

LPEFD XXVI menyoroti bahwa penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memiliki tren peningkatan dari tahun ke tahun. Penerimaan PDRD mengalami penurunan 14,24% di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 dan mulai meningkat kembali di tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi di daerah. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak daerah yang bersifat konsumtif seperti Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran mulai meningkat kembali di tahun 2021, dibandingkan tahun 2020. Pada beberapa Kabupaten/Kota, pajak daerah didominasi oleh jenis pajak daerah tertentu, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak MBLB, BPHTB dan PBB-P2. Kinerja tersebut selaras dengan kinerja pajak pusat yang tumbuh positif, perpajakan daerah mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini mengindikasikan aktivitas ekonomi yang semakin membaik baik di pusat maupun di daerah.

KALEIDOSKOP

Kinerja Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha

Fokus pada edisi LPEFD XXIX adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Mengingat tuntutan kebutuhan infrastruktur yang ada serta terbatasnya anggaran yang dimiliki, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu melakukan inovasi dalam pembangunan infrastruktur di daerahnya. Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dimana kontribusi pembangunan yang diharapkan dapat diperoleh dari swasta menjadi salah satu inovasi yang dapat dilakukan dalam penyediaan infrastruktur publik. Strategi penyediaan infrastruktur dengan KPBU dianggap sebagai strategi yang tepat ditengah keterbatasan anggaran. Berdasarkan daftar proyek KPBU yang dirilis dalam situs www.kpbu.kemenkeu.go.id, diketahui bahwa hingga saat ini terdapat 36 proyek KPBU. Dari 36 proyek KPBU tersebut, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) atas 14 proyek diantaranya berada pada tingkat pemerintah daerah. Dukungan Pemerintah Pusat telah diberikan dalam bentuk dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi, namun demikian masih banyak KPDBU yang berhenti ditengah jalan karena faktor regulasi, kapasitas fiskal daerah dan aspek lainnya. Perbaikan pelaksanaan KPDBU kedepan yaitu perlunya adanya sinergi pendanaan dari skema yang lain dan menambah insentif kepada daerah yang berhasil menjalankan skema KPDBU sehingga akan dapat mendorong Pemerintah Daerah lain untuk menggunakan pembiayaan kreatif (*creative financing*) untuk pembangunan infrastruktur di daerah.

KOMPENDIUM LPEFD XXXIV

Analisis perekonomian daerah di akhir tahun 2022 tentunya harus dimulai dari *compendium* perekonomian nasional. Salah satu sumber data dan informasi yang kredibel tentunya adalah dari lembaga pemeringkat dunia. Salah satu Lembaga dimaksud, Fitch Ratings (Fitch) telah mengafirmasi Sovereign Credit Rating untuk Indonesia di BBB (investment grade) dengan prospek stabil, seperti yang diumumkan pada Publikasi Bank Indonesia Nomor 24/341/DKom di tanggal 14 Desember 2022.

Dalam laporannya, Fitch memperkirakan ekonomi Indonesia akan terus pulih dan tumbuh sebesar 5,2% pada tahun 2022, di antaranya berkat surplus transaksi berjalan dalam dua tahun terakhir (2021-2022). Investasi asing terus meningkat berkat ekspor manufaktur yang lebih tinggi dan kegiatan hilirisasi. Dari sisi inflasi, pengetatan kebijakan moneter dapat mencatatkan inflasi pada target 3%+1% di akhir tahun 2022.

Pada sisi kebijakan fiskal nasional, Fitch menilai pemerintah perlu mengembalikan pagu anggaran di bawah 3% dari PDB dengan outlook defisit fiskal terus menyempit dari 4,6% pada 2021 menjadi 3,4% pada 2022. Hal ini akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemerintahan pertama di Asia Pasifik yang kembali ke alur tingkat defisit fiskal sebelum pandemi. Beberapa langkah peningkatan penerimaan negara termasuk kenaikan tarif PPN pada April 2022 telah mendukung pemulihan kinerja penerimaan APBN sehingga utang pemerintah diperkirakan untuk turun dari 41,1% pada 2023. Hal in jauh di bawah peer kategori 'BBB' sebesar 55,6% yang dengan demikian menyiratkan kesempatan untuk perbaikan peringkat utang oleh Fitch Ratings.

Analisis data rilis PDB dari BPS di triwulan III tahun 2022 mencatat bahwa permintaan konsumen yang kuat lebih dari sekadar mengimbangi pengeluaran pemerintah yang lebih rendah, sementara permintaan untuk ekspor komoditas Indonesia juga sehat, mendukung pertumbuhan dan menghasilkan *windfall* pendapatan fiskal. Berkat optimisme yang tumbuh terhadap prospek Indonesia, investasi asing melonjak hampir 64% pada kuartal ketiga tahun 2022, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021, terutama didorong oleh pengembangan pemrosesan sumber daya alam berkat lonjakan permintaan produk minyak sawit dan pertambangan logam / mineral yang mencatatkan surplus pada sisi ekstenal PDB dan membantu stabilitas nilai tukar.

Stabilitas ekonomi juga memberikan dorongan belanja konsumen. Fitch Solutions memperkirakan pengeluaran rumah tangga riil di Indonesia akan tumbuh sebesar 4,8% tahun-ke-tahun pada tahun 2022, meningkat dari pertumbuhan 2,2% yang tercatat pada tahun 2021. Faktor kunci yang mendukung afirmasi Fitch Ratings di atas adalah prospek pertumbuhan jangka menengah yang baik dan rasio utang/PDB pemerintah yang rendah.

Mencermati penilaian independen dari Fitch Ratings, terdapat dua hal kunci yang mengindikasikan peran perekonomian daerah dalam penguatan perekonomian nasional 2022. Pertama adalah permintaan konsumen yang kuat lebih dari sekadar mengimbangi pengeluaran pemerintah yang lebih rendah tidak lain berkat dampak kebijakan stimulus PC-PEN pada Transfer ke Daerah dalam APBN 2022. Kedua adalah pengembangan industri pengolahan sumber daya alam yang menarik investasi asing dengan lonjakan hampir 64% y-o-y pada kuartal ketiga tahun 2022 berkat di antaranya perbaikan infrastruktur dan layanan dasar terutama pendidikan di daerah.

Diagram-1 Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial 2022
(Sumber DJPK Kemenkeu, 2022)

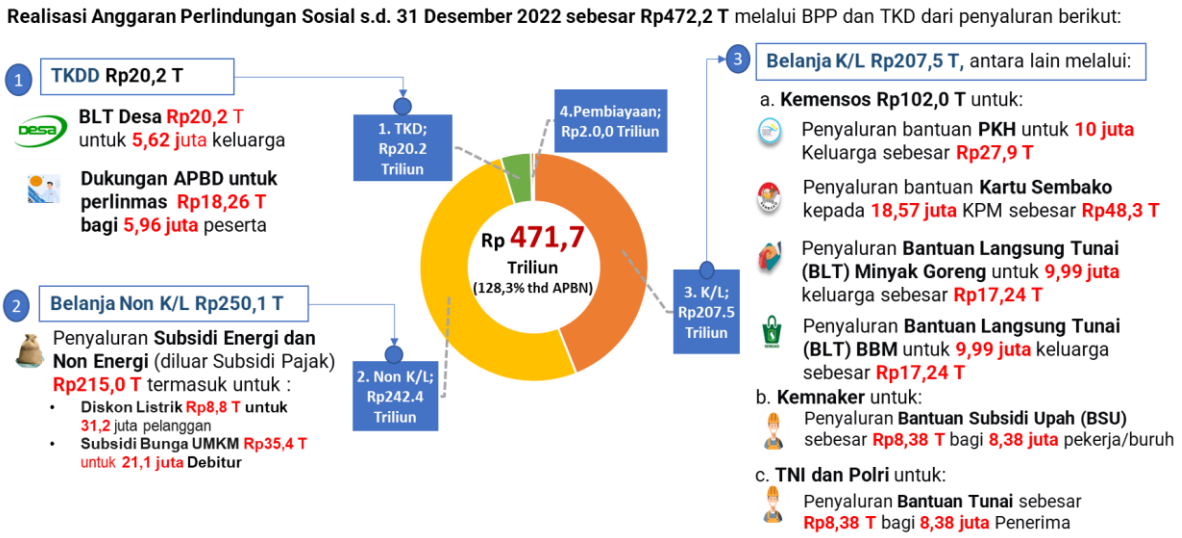

Analisis spasial SVAR dengan data Susenas 2021 menunjukkan bahwa efektifitas realisasi anggaran perlindungan sosial s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp472,2 T (lihat diagram-1) melalui BPP dan TKD telah mendorong secara signifikan capaian permintaan konsumen yang kuat dengan mempertahankan daya beli tiga kuantil terbawah kelompok penghasilan rumah tangga. Di antara komponen utama BPP dan TKD yang berperan signifikan adalah (1) BLT Desa Rp20,2 T untuk 5,62 juta keluarga, (2) Dukungan APBD untuk perlinmas Rp18,26 T bagi 5,96 juta peserta, dan (3) Penyaluran bantuan PKH untuk 10 juta Keluarga sebesar Rp27,9 T.

Analisis spasial SVAR dengan data Susenas 2021 juga menjukkan bahwa efektifitas realisasi anggaran pendidikan 2022 s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp472,2 T (lihat diagram-2) melalui BPP dan TKD telah mendorong secara signifikan capaian lonjakan pembentukan modal bruto dari PDRB pada 10 provinsi terbesar hingga hampir 64% y-o-y pada kuartal ketiga tahun 2022.

Menutup LPFED tahun fiskal 2022, akan sangat menarik kiranya untuk menganalisis dampak implementasi UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di tahun depan untuk komparasi kondisi beberapa tantangan yang digarisbawahi oleh Fitch, termasuk pendapatan pemerintah (daerah) yang lemah terutama karena fitur struktural yang tertinggal, seperti indikator tata kelola, dibandingkan dengan peers di kategori 'BBB'.

Diagram-2 Realisasi Anggaran Pendidikan 2022
(Sumber DJPK Kemenkeu, 2022)

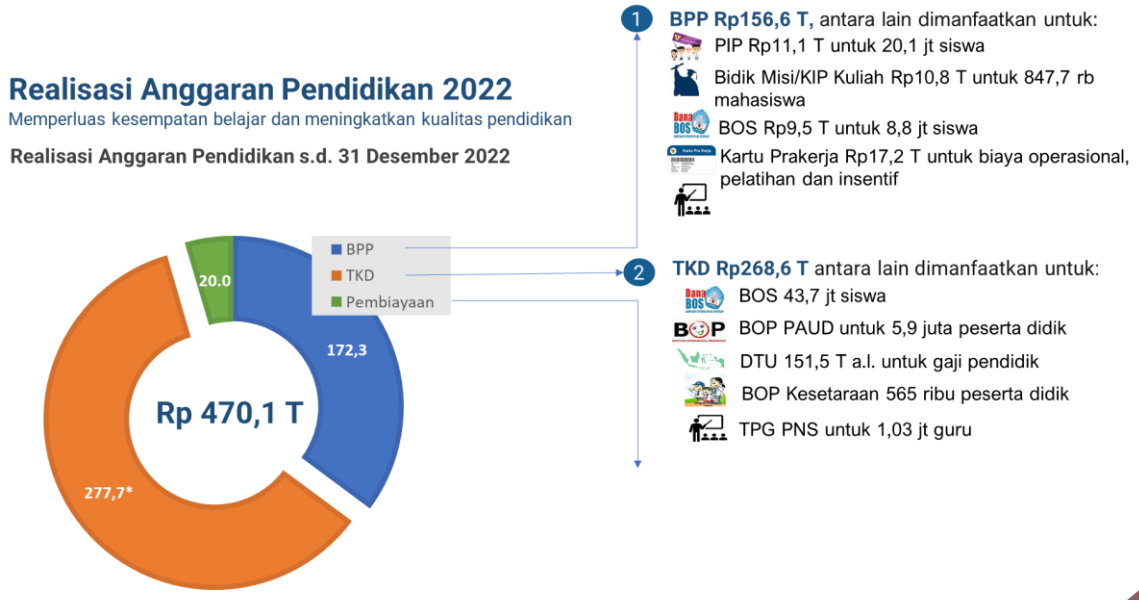

Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah

DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Luky Alfirman • Mariatul Aini • Purwanto • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi
Kindy R. Syahrir • Imam Mukhlis Affandi • Britany Alasen Sembiring • Ilham Hadiana • Purwandi Santoso
Isnanto Wimboro Dahrojatun • Catur Panggih Pamungkas • Poppy Suprapti • Irfan Sofi • Sigit Wahyu Kartiko
Ganjar Prihatmoko • Nanag Garendra Timur • Amrul Yusroni • Rossi Rizki Bestari • Dimas Agung Nugraha
Narits Muhammad Syafruddin • Desy Puspita A • Nabillah Rahma • Nadia Nurul Nisa
Selma Syifa Khoirunnisa • Khishbatur Rizqiyah • Netta An'amta Desli Sanati